

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROYEK *MULTIYEARS*

Tiara Felida Lovinasia

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Development Projects *Multiyears* Policy. The six projects are : first the development of tempuling airport which is expected to open up isolated areas. But until noe the activity at that airport remains inadequate. Two is only susiair at the airline operating fligh from pekanbaru-tembilahan one time weekly second, the airport of trench 21 (Parit 21). The current condition is not maintained. After completion of buiding, three has never been loading and unloading activities. Now only as a place for recreation and fishing spot. The third is Terminal Laksamana of land transportation that place is almost empty. Freight cak parking pretek waiting the passengers on the road near the market. Three other projects are the building of Islamic Center, the constauctions building for UNISI, and the development of the Highway Tempuling-Mandah which had sacriticed of public and private interests, but the results still fak from expectations. It can be said, government have been succed regarding the construction of building, but in term of utilization narrowly failed fungctionalized.

Abstrak: Kebijakan Pembangunan Proyek *Multiyears*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian Pemerintah Daerah dalam membangun 6 Proyek *Multiyears* dalam dua periode pada kepemimpinan Bupati yang sama. Namun manfaatnya tidak dapat dirasakan, triliunan uang rakyat Kabupaten Indragiri Hilir seakan terbuang percuma. Enam proyek tersebut yang pertama Pembangunan Bandar Udara Tempuling, yang awalnya untuk membuka isolasi daerah namun setelah selesai pengerjaannya, tidak ada maskapai yang mau mendaratkan pesawat di bandara ini. Kedua Pelabuhan Parit 21, kondisinya kurang terawat, dan setelah dibangun tidak pernah ada aktifitas bongkar muat. Ketiga Terminal Laksamana Indragiri, yang meski bisa difungsikan tapi tidak seoptimal yang diharapkan. Ditambah 3 proyek *multiyears* lainnya, yaitu Gedung UNISI, Gedung Islamic Center, dan Jalan Highway Tempuling-Mandah. Keberadaan tiga proyek ini telah memakan korban fasilitas publik demi kepentingan perorangan. Hasil enam pembangunan ini sangat jauh dari harapan. Pemerintah daerah bisa dikatakan berhasil untuk pembangunan, namun untuk pemanfaatannya dianggap tidak mampu untuk memfungsikannya.

Kata Kunci: analisis kebijakan, pembangunan, proyek *multiyears*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu rencana pembangunan yang berorientasi di masa mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis, dan dapat dilaksanakan. Rencana pembangunan tersebut dianggarkan melalui sumber pendanaan program kegiatan yang tertuang dalam peraturan daerah yang mengikat anggaran dana untuk pembangunan proyek *multiyears*. Setidaknya terdapat tiga proyek dalam *multiyears* ini, yaitu Pelabuhan Parit 21, Bandara Tempuling, dan Terminal Laksamana Indragiri. Ketiga proyek ini memakan dana Rp. 221.222.962.937.-

Ketiga proyek ini memang sudah selesai pengerjaannya, namun yang menjadi masalah adalah sejauh ini proyek tersebut tidak difungsikan. Padahal sudah ratusan miliar anggaran yang

tersedot kesana. Proyek ini berlangsung pada masa kepemimpinan Bupati Indra Muclis Adnan. Pada periode berikutnya, yaitu tahun 2009-2013 Indra Muchlis Adnan terpilih kembali menjadi Bupati Indragiri Hilir dengan wakilnya Rosman Malomo. Hal ini membuktikan bahwa Indra masih dipercaya masyarakat untuk memimpin lagi. Karena sebelumnya target proyek sudah tercapai di periode pertama dalam transportasi, pada periode kedua ini Indra Muchlis membuat kembali program proyek *multiyears* untuk meningkatkan program pendidikan, yaitu dengan membangun Gedung Universitas Islam Indragiri (UNISI), Gedung Islamic Center, dan Jalan Bandara Tempuling-Mandah.

Permasalahan yang ingin dilihat pada penelitian ini adalah kebijakan yang terkait pembangunan proyek *multiyears* di atas. Yang hingga sampai berganti kepemimpinan oleh Bupati

H.M.Wardan periode 2014-2018 tidak ada terlihat pemanfaatan pembangunan enam proyek *multiyears* yang dibangun pada masa kepemimpinan Indra Muchlis tersebut.

Fokus utama pembahasannya untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pembangunan proyek *multiyears* dengan total anggaran satu triliun masa kepemimpinan Bupati dua periode Indra Muchlis yang tujuannya belum tercapai sampai batas waktu yang ditentukan. Serta bagaimana keputusan Bupati yang baru, yaitu H.M Wardan tentang kelanjutan pembangunan proyek *multiyears* di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek (unit analisis) yang ada. Pada penelitian kualitatif, fungsi seorang peneliti sebagai instrument utama. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi melalui informan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Data yang berhasil dikumpulkan diklasifikasikan kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Proyek *Multiyears*

Dalam perencanaan pembangunan proyek *multiyears* di Kabupaten Indragiri Hilir, pastilah tidak terlepas pada kebijakan mega proyek pada masa kepemimpinan dua periode Indra Muchlis. Hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir karena dalam 2 periode masa kepemimpinannya ada 6 proyek *multi-*

years. Dan anggaran yang diperlukan sangatlah besar. Jika pembangunannya hanya diharapkan dengan APBD saja.

Pada awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2004-2008 dimenangkan oleh pasangan Indra Muchlis dan H.M Yusuf yang dijodohkan secara politik oleh pendukung mereka. Namun dalam menjalankan tugasnya, Bupati menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan komandonya. Dan memberikan posisi-posisi strategis kepada orang-orangnya yang diketahui bertujuan sebagai *marketing politik* Bupati, hasilnya Wakil Bupati yaitu Yusuf tidak kebagian peran dalam menjalankan tugasnya.

Dimasa kepemimpinan Bupati Indra Muchlis Adnan periode 2004-2008 membuat kebijakan untuk pembangunan dalam meningkatkan transportasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari :

1. Transportasi Laut, dengan membangun pelabuhan dengan fasilitas yang lengkap. Karena tembilahan dibangun di atas tanah rawa yang dialiri air Sungai Indragiri yang merupakan urat nadi jalur perhubungan air.
2. Transportasi darat, dengan membangun Terminal untuk mengumpulkan agen tiket berkumpul di satu tempat untuk memudahkan masyarakat dalam mencari agen tiket perjalanan baik antar desa hingga antar provinsi. Yang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lengkap.
3. Transportasi Udara, dengan membangun Bandara pertama di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memudahkan akses perjalanan dan waktu dari Indragiri Hilir menuju kota-kota lainnya seluruh Riau.

Di periode 2009-2013 Indra Muchlis kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakilnya Rosman Malomo. Bapak Rosman memang dikenai cukup dekat dengan Indra Muchlis. Dan pasangan selalu berbagi dalam urusan pemerintahan. Di periode kedua ini bapak Indra memfokuskan pembangunan untuk pendidikan yang lebih baik dan di imbangi dengan ilmu agama, agar tidak tertinggal dari daerah lainnya dengan fasilitas yang mendukung, yaitu :

1. Universitas Islam Indragiri, Indra Muchlis merencanakan membangun universitas yang

akan menjadi universitas kebanggaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan rencana ini didukung penuh oleh ibu Septina pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) di Tembilahan. STIE pun dibubarkan dan bergabung dengan UNISI yang telah diresmikan tahun 2008. Namun yang menjadi kendala, karena sudah menjadi universitas perlu pembangunan yang lebih besar. Karena itu Bapak Indra merencanakan pembangunan untuk Universitas Islam Indragiri yang direncanakan di bangun di tengah kota dalam kawasan lingkungan elit di tembilahan.

2. Islamic Center, pembangunan ini direncanakan akan mejadi ciri khas Kabupaten Indragiri Hilir karena akan dilengkapi dengan Masjid Utama yang megah. Yang akan dilengkapi dengan sekolah dari SD, SMP, dan SMA Plus, akan dilengkapi juga dengan pesantren.
3. Jalan *High Way* Tempuling-Mandah, karena di Kecamatan Tempuling sudah ada Bandara yang dibangun di kepemimpinan Bupati periode pertama, dan pembangunannya sudah selesai dan diresmikan di tahun 2009 pada awal kepemimpinan Bapak Indra periode kedua. Merencanakan membangun badan jalan dari tempuling menuju Mandah yang selama ini akses jalannya hanya dapat dilalui jalur laut. Jalan *high way* ini juga atas permintaan Bapak Rusli Zainal yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Riau. Karena Kecamatan Mandah merupakan tempat kelahiran Bapak Rusli dan tidak ingin daerahnya terisolasi. Akhirnya dibuatlah kebijakan untuk pembangunan jalan Tempuling-Mandah.

Pembangunan bidang perhubungan pada hakikatnya bertujuan, (1) untuk membuka isolasi daerah kecamatan dan desa, (2) menyediakan dan memelihara fasilitas jalan, jembatan, pelabuhan, lapangan udara serta terminal untuk member kemudahan bagi proses angkutan orang dan barang dalam rangka mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, (3) menciptakan suasana disiplin, rasa aman, saling menghargai dan tertib berlalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan.

Pada periode pertama Indra Muchlis dan

Muhammad Yusuf terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2004-2008. Di awal kepemimpinan Indra, dalam prioritasnya merencanakan untuk meningkatkan transportasi baik dari udara, laut, maupun darat. Dengan 3 pembangunan proyek *multiyears* yang pengerjaannya dimulai dari tahun 2006 hingga tahun 2008 hingga akhir jabatan.

Pada periode 2009 Indra kembali menjabat sebagai Bupati yang didampingi oleh Rosman sebagai Wakil Bupati. Setelah sukses dalam pembangunan 3 proyek *Multiyears* di periode pertama dalam bidang transportasi yang pengerjaan pembangunannya sudah selesai di kerjakan. Pada periode kedua ini Indra kembali membuat kebijakan dalam tiga pembangunan besar yang biayanya lebih besar dari pembangunan periode sebelumnya.

Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Proyek *Multiyears*

Terminal Laksamana Indragiri

Pembangunan terminal ini diharapkan mampu mengatasi makin tingginya intensitas angkutan darat. untuk memfungsikannya sangat sulit bagi pengusaha angkutan, sebenarnya di tahun 2010 setelah diresmikan semua agen tiket berkumpul di terminal ini. Namun satu persatu perlahan meninggalkan loketnya dan kembali beroperasi di tempat awal dalam kurun waktu 8 bulan.

Pelabuhan Parit 21

Pelabuhan Fort of Indragiri atau yang lebih dikenal masyarakat di Tembilahan Indragiri Hilir (Inhil) dengan sebutan Pelabuhan Parit 21 ini memang sudah selesai dibangun tahun 2010, namun hingga selesai pembangunannya Pelabuhan tersebut tidak kunjung dioperasikan untuk tempat tambat kapal dan turun naik barang angkutan. Karena ternyata masih panjang proses izin yang harus diurus.

Bandar Udara Tempuling

Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab atas fasilitas sisi udara dalam program pengembangan sarana dan prasarana fasilitas Bandar udara dan keselamatan penerbangan

dengan biaya Rp. 103.664.111.000 dari tahun 2005-2008. Fasilitas sisi udara meliputi : *Runway*, *Taxiway*, *Apron*, *Shoulder*, fasilitas navigasi, fasilitas PKP.PK. Sedangkan pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas fasilitas sisi darat dalam program pengembangan sisi darat Bandara Tempuling dengan biaya sebesar Rp. 56.763.140.000 tahun 2005-2008.

High Way Tempuling-Mandah

Melihat dari geografisnya, hampir semua daerah yang berada di wilayah Indragiri Hilir sangat membutuhkan sarana pembuka isolasi, terutama di wilayah Indragiri Hilir bagian utara. Sarana penghubung, seperti jembatan dan jalan darat daerah, sejauh ini terlihat sangat minim. Sehingga untuk kelancaran perekonomian sering terkendala. Apalagi diperparah dengan adanya kondisi alam pasang surut yang membuat akses penghubung ke suatu daerah tersebut jadi terganggu.

Gedung Universitas Islam Indragiri

Yayasan Tasik Gemilang yang menaungi UNISI diketahui milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Makanya saat Bupati dipegang Bapak Indra banyak anggaran yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan tersebut. Universitas Islam Indragiri ditegaskan Bupati bukan lembaga pendidikan swasta, melainkan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini diungkap langsung oleh bupati agar pertanyaan banyak kalangan terkait status lembaga pendidikan tinggi itu. Lembaga ini juga sebagai bukti komitmen Pemkab dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan menerangi angka kemiskinan.

Gedung Islamic Center

Gedung Islamic Center ini didirikan di atas areal dengan luas sekitar 7 hektare. Direncanakan Islamic Center ini akan membangun gedung sekolah unggulan mulai dari SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, serta Mesjid Raya yang akan dibangun di atas areal sekitar 1 (satu) hektare. Untuk pembangunannya harus mengorbankan salah satu bangunan pesantren tertua di Indragiri Hilir, yakni Pondok Pesantren Tunas Harapan (PPTH). Sehingga persoalan ini sempat menjadi

polemik antara Pemerintah Daerah dengan Pemilik Yayasan Tasik Gemilang yang saat itu dinaunginya.

Pelaksanaan Pembangunan Proyek *Multiyears* 2014-2016

Dengan tidak mungkinnya APBD Indragiri Hilir untuk anggaran dana melanjutkan Proyek *Multiyears* di tahun 2010 yang masa pengerjaannya habis di tahun 2013. Sekarang tergantung kepemimpinan yang baru, yaitu Bapak Wardan dan Bapak Rosman. Keberadaan proyek *multiyears* di awal kepemimpinan HM Wardan sudah menjadi beban. Tidak dilanjutkan sudah berapa uang yang terbenam. Karena mulai dari awal perencanaan dan pembangunan awal, kepentingan segelintir orang lebih menonjol ketimbang kepentingan masyarakat. Sekarang Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Perhubungan selalu didesak berbagai pihak untuk segera mengoperasikan tiga aset daerah yang dinilai strategis dan sudah siap pembangunannya yaitu mulai dari Terminal Laksamana Indragiri, Parit 21, dan Bandar Udara Tempuling. Alasannya, pembangunan ketiga infrastruktur daerah tersebut sudah lama selesai, namun sama sekali belum memberikan kontribusi bagi daerah. Dari tahun 2014 Pemerintah Kabupaten sama sekali tidak memiliki perencanaan yang jelas untuk mengembangkan aset tersebut menjadi sumber pendapatan bagi kabupaten.

Setelah selama 1 tahun pembangunan proyek *multiyears* tidak dilanjutkan, tahun 2015 hingga 2016, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil kembali tidak melanjutkan pembangunan proyek-proyek-proyek besar yang terdiri dari Gedung Unisi, Islamic Centre dan pembangunan Jalan *High Way* Tempuling Mandah tersebut. Memang masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Yang dengan seiringnya waktu baru terungkap bahwa rata-rata pembangunan mega proyek ini semata demi kepentingan kelompok tertentu.

Sebagai pemimpin di negeri ini secara keseluruhan cukup bagus dengan segala programnya, namun semuanya berjalan tanpa arah dan selama ini belum menyentuh kelapisan bawah.

Seperti Magrib Mengaji, jumat bersih, sarapan dirumah bagi PNS, zakat profesi, dan terbukti segala program yang telah dicetuskan tidak membuat segala persoalan yang urgen menjadi lebih baik.

Permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bapak HM. Wardan yang tidak tercapai atau belum memuaskan masyarakat. Terutama tidak adanya kelanjutan Pembangunan Gedung UNISI dan Islamic Center juga menjadi acuan pandangan masyarakat terhadap masa pemerintahan Wardan yang setengah-setengah mengusahakan.

Faktor Penghambat Pembangunan Proyek Multiyears

Proyek *multiyears* yang mulai dibangun sekitar tahun 2006 saat masa kepemimpinan Indra Muchlis kini tidak difungsikan pembangunannya, sehingga ratusan miliar anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan proyek-proyek itu hanya terbuang sia-sia. gagasan mantan Bupati Inhil selama 2 periode itu di tahun 2010 masih terbengkalai juga adalah Jalan Highway Tempuling-Mandah, gedung Islamic Centre dan gedung Unisi Tembilahan.

Dari tahun 2014-2016, tidak ada terlihat kelanjutan pembangunan proyek *multiyears* itu. Alhasil tempat-tempat tersebut hanya seperti gedung tak bertuan. Masyarakat Inhil juga merasa kecewa dengan kebijakan H.M Wardan yang tidak melanjutkan pembangunan itu. Padahal bagi mereka jika pembangunannya dilanjutkan masyarakat akan sangat terbantu. Seperti *Highway* Tempuling-Mandah, itu jika cepat selesai kita tidak perlu lagi menggunakan *speedboat*. Belum lagi gedung Unisi, sudah semegah itu tapi dibiarkan saja terbengkalai.

Saat itu alasan pemerintah tidak melanjutkan dikarenakan hasil dari pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum selesai diaudit. Legislatur menilai lambannya hasil audit dari adalah salah satu faktor memperlambat pembangunan hingga terbengkalainya beberapa mega proyek *Multiyear* di daerah. Seperti pembangunan Gedung Unisi, Islamic Center, *High Way* Tempuling-Mandah, Bandara Tempuling, Pelabuhan Parit 21, dan hal

ini tak bisa dilanjutkan karena sesuai aturan.

Setelah 3 tahun berjalannya pemerintahan Wardan dan Rosman, tetapi proyek pembangunan *multiyears* ini tak kunjung menemukan kejelasan apalagi untuk melanjutkan. Namun setelah audit selesai pada bulan Juni 2016 hingga akhir 2016 belum ada titik terang untuk kelanjutannya. Wardan dinilai lamban dalam mengambil keputusan. Bukan hanya dari masalah proyek *multiyears* dalam berbagai hal lainnya. Terutama dalam mengelola APBD 2015 yang anggarannya masih tersisa Rp.500 miliar lebih padahal anggarannya bisa membuat pembangunan yang lebih signifikan.

Keberhasilan Indragiri Hilir membangun mega proyek *multiyears* akhirnya mendapat cibiran dari banyak kalangan. Kenyataannya hingga sekarang setelah pembangunan selesai, fungsi dan manfaat dari tujuan pembangunan tersebut tidak bisa dirasakan oleh masyarakat Indragiri Hilir. Padahal masih banyak sektor-sektor lain yang seharusnya menjadi prioritas, seperti perbaikan jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan pembangunan sekolah yang rusak.

Untuk pembangunan yang tidak tepat sasaran ini, diharapkan antara pihak eksekutif dan legislative untuk tidak saling menyalahkan. Apalagi masalah yang dibahas mengenai adanya anggaran bantuan dana APBD Provinsi dan APBN memang tidak ada, kebanyakan murni APBD Indragiri Hilir. Namun itu sudah jadi keputusan bersama untuk membangun. Sekarang tinggal bagaimana untuk melanjutkan pembangunan yang telah dibangun agar tidak terkesan mubazir. Keberadaan pembangunan ini diharapkan untuk mencegah hal yang sama di kemudian hari.

SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memang berhasil dalam membangun enam proyek *multiyears* dalam dua periode kepemimpinan Bupati yang sama. Namun untuk pemanfaatannya masih jauh dari harapan. Triliunan uang rakyatpun seakan terbuang percuma akibat keberadaan pembangunan tersebut. *Pertama*, Bandar Udara Tempuling, setelah *finishing* tidak ada maskapai yang mau mendaratkan pesawat

di bandara tersebut. Di tahun 2015 maskapai Susi Air yang beroperasi, namun masih sepi peminat. *Kedua*, Pelabuhan Parit 21, setelah pembangunannya selesai tidak pernah ada aktivitas bongkar muat yang harus diurus oleh Pemda. *Ketiga*, Terminal Laksamana Indragiri yang meski bisa difungsikan, tapi tidak seoptimal yang diharapkan. Ketiga proyek ini dapat dikatakan tidak ada mendatangkan PAD. Harusnya keberadaannya dapat meningkatkan PAD. *Keempat*, Gedung Islamic Center yang pembangunannya terbengkalai tidak difungsikan. *Kelima*, Gedung UNISI, telah menghancurkan bangunan SMAN 1 Tembilahan Kota dan jalan DPRD lama yang semua pembangunannya menggunakan APBD. *Keenam*, Pembangunan Jalan *High Way* Tempuling-Mandah, entah berapa ribu pohon kelapa yang masyarakat korbankan namun tidak sesuai dengan harapan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Farid. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajagrafindo
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Madani, Muchlis. 2011. *Dimensi Interaksi dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Makasar: Graha Ilmu
- Nugroho, Iwan, Rokhmin Danuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Nuhgroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2011. *Publik Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Putra, Fadillah 2001. *Paradigma Krisis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riyadi, Bratakusumah, Deddy Supriady. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Wahab, A. Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Surabaya: CV Cutra Media
- Wrihatholo, Randy R. dan Riant Nugroho F. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

ELIT STRATEGIS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR RIAU TAHUN 2013

Buldani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Strategic Elite in The Local Elections of Governor and Vice Governor of Riau Province in 2013. Decreased levels of community voters in local elections Governor and vice Governor of Riau in Kampar Kiri. This certainly see action taken by the character in the Kampar Kiri to encourage people to use their right to vote in local elections. So figure that has position and influence in the community referred to as elite. So the elite are people who are successful and have positions in society. The purpose of this study is to find out who called elite of the study sites and analyze the role of elites in urging people to vote. The result showed that the lack effort made by the elite in Kampar Kiri encouraging people to vote in local election Governor dan Vice Governor are underway. There are only a few elite who sought but not yet public awareness to choose and also from the elite do not understand his duties and functions as an elite who have positions and responsibility to the community in terms of selection. Then the elite assume that those responsible at the time of the local elections is the government and organizers.

Abstrak: Elit Strategis dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013. Menurunnya tingkat pemilih masyarakat Kampar Kiri pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Hal ini tentu melihat upaya-upaya yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya pada waktu pemilihan. Maka tokoh yang mempunyai jabatan dan pengaruh ditengah masyarakat yang disebut sebagai elit strategis. Elit merupakan orang-orang yang berhasil dan mempunyai jabatan ditengah masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa yang disebut sebagai elit di lokasi penelitian dan menganalisa peran elit dalam mengajak masyarakat untuk memilih pada Pilkada Gubenur dan Wakil Gubernur di Kampar Kiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang peran yang dilakukan oleh elit yang ada di Kampar Kiri dalam upaya mendorong masyarakat Kampar Kiri untuk memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau belangsung. Hanya ada beberapa elit saja yang berupaya tetapi belum menyentuh pada kesadaran masyarakat untuk pemilihan serta ada juga dari elit tersebut belum memahami tugas dan fungsi ia sebagai elit yang mempunyai jabatan dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam hal pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, serta ada elit menganggap bahwa yang bertanggung jawab pada waktu pemilihan adalah pemerintah dan pihak penyelenggara.

Kata Kunci: elit strategis, Pilkada, kesadaran masyarakat

PENDAHULUAN

Demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. (Budiyanto, 2006).

Sistem demokrasi telah membuka ruang yang lebih besar kepada setiap warga negara untuk terlibat lebih aktif di arena politik. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi langsung, maka hal ini berarti adanya

kesempatan kepada semua rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang efektif melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, maka seluruh lapisan masyarakat daerah berhak dan perlu mendapat ruang keterlibatan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun dilakukan melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.

Keterlibatan masyarakat tersebut terlihat pada aspek partisipasi penggunaan hak pilih dalam pilkada, hampir sama dengan pemilihan

presiden dan wakil presiden. Semua lapisan masyarakat berkesempatan untuk menentukan hak pilih. Namun kenyataan masyarakat lebih tidak memilih ketimbang menggunakan hak pilihnya. Menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, selain kemungkinan besar disebabkan rendahnya frekuensi sosialisasi pilkada oleh KPU dan kampanye yang dilakukan oleh para calon, juga bisa disebabkan oleh faktor apatis masyarakat melihat pemilu sering dilakukan, namun perubahan yang dijanjikan oleh para calon tidak kunjung tiba. Pilkada di mata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elit lokal untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan.

Hampir setiap pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun kepala daerah, masyarakat yang mempunyai hak pilih mengalami penurunan dan rendahnya menggunakan hak pilih di tengah masyarakat karena berbagai alasan tertentu. Rendahnya partisipasi politik untuk menggunakan hak pilih menandakan suatu bentuk kekecewaan sebagian rakyat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah, keterwakilan di parlemen, dan praktek korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Masyarakat tidak memiliki pilihan yang baik dan tepat terhadap partai-partai politik dan para kandidat pemimpin pusat dan daerah. Mereka dianggap tidak kompeten (mampu dan berguna) dan tidak dapat dipercaya dari berbagai janji-janji selama kampanye berlangsung. Masyarakat selama ini telah dibohongi dan dibodohi oleh janji politik yang dikomunikasikan oleh para kandidat untuk membawa daerahnya menuju perubahan yang lebih baik. Selain itu, secara ideologi, masyarakat yang kritis tidak akan dipercaya begitu saja dengan sistem demokrasi yang dipakai pemerintah.

Banyaknya angka tidak memilih atau golongan putih (golput) perlu diwaspadai sebagai kegagalan demokrasi. Inilah kesimpulan *focus group discussion* yang dipandu oleh Ganjar Kurnia, Rektor Universitas Padjadjaran (2008), Zulriska berpendapat bahwa adanya kebosanan publik untuk berpartisipasi dalam pemilu juga harus dicermati. Menanggapi tingginya angka golput, ia menggunakan adanya ketidakpuasan mas-

yarakat terhadap figur calon pemimpin sebagai salah satu faktor penyebab golput. Lebih lanjut Zulriska mengungkapkan bahwa golput merupakan perilaku yang timbul akibat adanya kekecewaan rakyat. Penyebab golput sendiri, menurut Mariana, memiliki variabel yang tidak homogen.” Adanya banyak alasan mengapa seseorang memilih golput, diluar masalah administrasi seperti pendataan, bisa jadi masalah ideologi”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang disebut sebagai elit strategis di lokasi penelitian dan menganalisa peran elit dalam mengajak masyarakat ikut memilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda dan pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah, dengan membedahkan dan mengguliti serta mengenal masalah-masalah selanjutnya mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang terjadi, terutama tentang peran elit pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau putaran kedua Tahun 2013. Untuk pengambilan data dengan menggunakan dua orang *key informan* untuk menjawab pertanyaan wawancara masing-masing elit di lokasi penelitian di ambil dua kunci informan, yaitu dari elit agama, elit budaya/adat, kepala desa, ketua pemuda dan penghubung antara tim sukses dengan masyarakat.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi pada hakikatnya mencari